Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya

JURNAL

Oleh :

Nama : Moh Abby Bhakti Utama

Nomor Mahasiswa : 14313019

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya

Moh Abby Bhakti Utama

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

m.abbybhaktiutama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi antara Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya. Data yang diperoleh yaitu dari salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Infrastruktur fasilitas daerah yang dilaksanakan selama enam tahun yaitu dari tahun 2011-2016. Hasil analisis ECM menunjukan bahwa pada jangka panjang pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur pertanian lebih berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah sedangkan infrastruktur kesehatan tidak berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah. Pada jangka pendek pembangunan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur pertanian lebih berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah sedangkan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur kesehatan tidak berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah

Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah, dan ECM.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan Negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya agar berdaya guna dan berhasil dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, namun permasalahan yang sering dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan adalah kecilnya proporsi dana pembangunan yang berasal dari kewenangan otonomi daerah. Pemberian otonomi

daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerah (Putro, 2011).

Oleh karena itu diperlukan wawasan akan pembangunan untuk mencapai sasaran dan meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan daerah dan pembangunan daerah itu sendiri bergantung pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Susanto, 2005). Sumber dana daerah tidak hanya bergantung pada APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, sektor swasta adalah salah satu komponen yang sangat diperlukan untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur karena keterlibatan sektor swasta diasumsikan akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih cepat dan baik (Adam, 2014). Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan bagi investor dalam pembangunan infrastruktur, karena semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam sebuah pemerintahan daerah, tentu memiliki tujuan untuk mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang maju sangatlah tinggi, hal tersebut dapat ditunjang dengan perbaikan infrastruktur atau dari segi sumber daya daerah itu sendiri sehingga daerah tersebut memiliki kemajuan dari segi pembangunan daerahnya. Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya di bagian utara, di daerah selatan samudra hindia, di daerah timur Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, di daerah barat Kabupaten Garut. Luas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 2.708,81 Km2 atau 270.881Ha, secara administratif terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2014 berjumlah 1.728.618 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat

kepadatan penduduk rata-rata 638 jiwa/Km2. Tasikmalaya umumnya bertumpu pada sektor pertanian, pertenakan, perikanan, perdagangan, industri olahan dan pertambangan seperti pasir Galunggung yang memiliki kualitas cukup baik bagi bahan bangunan, industri, dan perdagangan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki berbagai tempat wisata seperti Kampung Naga, Gunung Galunggung, Pantai Cipatujah, Pantai Sindangkerta, dan Pantai Karang tawulan serta kerajinan di daerah Rajapolah yang terkenal dengan kerajinan anyaman seperti tikar, anyaman dari bambu, mendongan, perabotan rumah tangga, payung tasik, kelom geulis dan batik tulis. (Tasikmalaya, 2017). Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya apabila dimaksimalkan maka dapat dijadikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dari penerimaan tersebut dapat digunakan salah satunya untuk pembangunan daerah termasuk infrastruktur daerah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek pada Pembangunan Infrastruktur Daerah yang pada penelitian ini diambil Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Pariwisata, dan Infrastruktur Pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011-2016 dengan data Triwulan. Manfaat dari penelitian ini dari segi masyarakat diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana dan darimana sebuah daerah mendapatkan pemasukan dalam mengembangkan infrastruktur daerahnya, sehingga masyarakat lebih mampu membantu Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pendapatannya dan dari segi pemerintah diharapkan Memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh antara Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah dan seberapa kuat pengaruh yang terjadi diantara keduanya sehingga dapat dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom (Herman, 2014). Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai factor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan berorganisasi. Otonomi daerah tidak menyangkut permasalahan dalam bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal, dan agama serta kewenangan bidang lain, bidang tersebut termaksud kewenangan pemerintah pusat. Menurut (Khalistyowati, 2017) Daerah otonom dapat terlaksana dengan asas desentralisasi, karena pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Dalam hal ini memungkinkan kabupaten menganut dan mengatur rumah tangganya sendiri dan pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merealisasikan prakarsa pembangunan daerah dan harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang terdiri dari sumber-sumber dalam wilayahnya tersebut yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Elita, 2002), yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan

Barang daerah atau semua aset-aset yang dimiliki oleh suatu daerah, merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan selain fungsinya untuk pendapatan daerah, aset daerah juga perlu dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab karena dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dan pendapatan bagi pembangunan daerah. Maka dari itu adanya peraturan atau kebijakan dari pemerintah daerah tersebut untuk dapat melakukan penilaian serta pengelolaan aset daerah dengan baik, yang sudah tentu hasilnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan suatu daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang No 25 tahun 1999 menyebutkan lain-lain pendapatan yang sah yaitu:

1) Hibah

2) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
3) Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
4) Penerimaan giro
5) Rupa-rupa pendapatan (pengalihan dari pos ukuran kas dan perhitungan)

B. Dana Perimbangan

Menurut (Yuniarto, 2009) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pamerintah daerah serta antar pemerintah daerah, terdiri dari:

1) Dana bagi hasil

Bersumber dari pajak bumi dan bangunan, BPHTB, PPh

2) Dana alokasi umum (DAU)

DAU bertujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai daerah dalam melaksanakan desentralisasi

3) Dana alokasi khusus (DAK)

Bersumber dari APBN yang digunakan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah daerah diperbolehkan melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan hutang luar negeri dari Menteri Keuangan dengan nama Pemerintah Pusat setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modak pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah atau milik swasta. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daera yang dipegang oleh Bendahara Umum Daerah.

Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dan diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Banyaknya program pembangunan pada berbagai bidang telah dilakukan, tetapi masih banyak daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek. Salah satu ketertinggalan tersebut adalah minimnya akses warga desa terhadap sarana penunjang kehidupan. Kondisi ini menyebabkan umumnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sangat rendah bahkan stagnasi.

Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa tahun ini banyak merubah daerahnya agar dapat bersaing dengan daerah lainnya yang telah maju. Dalam rancangan APBD dapat dirinci dengan sistematis seberapa besar Kabupaten Tasikmalaya melakukan perbaikan dalam segi infrastruktur pada beberapa sektor berikut:

1) Sektor kesehatan

a. Pembangunan puskesmas
b. Program untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD
c. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

2) Sektor pertanian

a. Pembangunan sarana pengembangan pertanian ramah lingkungan
b. Pengbangunan sarana pengembangan agribisnis(seperti buah manggis)
c. Pembangunan SID pencetakan sawah baru
d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
f. Program peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran, dan ekspor hasil pertanian
g. Program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian

3) Sektor jalan

a. Pembangunan jalan
b. Peningkatan/perbaikan infrastruktur jalan
c. Pembangunan infrastruktur jalan desa

4) Sektor pariwisata

a. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata
b. Pengelolaan kekayaan daerah dan keragaman budaya
c. Terfasilitasinya kelompok seni dalam melestarikan kesenian daerah
d. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan kesenian daerah
e. Program pengembangan kemitraan (seperti adanya festival batik, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku kepariwisataan)

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Hasil-hasil penelitian terdahulu ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. (Soamale, 2013), tentang penelitiannya mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Study Di Kabupaten Kepulauan Sula) " menerangkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif sebesar 0,63% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,02% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sula. Perbedaan penelitian yang dilakukan Mulyadi Soamale dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Mulyadi Soamale meneliti mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah dalam pembangunan daerah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis melihat pengaruh pembangunan infrastrukutr daerah pada penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah.

(Khalistyowati, 2017), tentang penelitiannya mengenai "Analisis Korelasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah" menerangkan bahwa penelitian dilakukan selama tiga tahun dari 2007 hingga 2009 hubungan secara keseluruhan selama tiga tahun menunjukan pendapatan asli daerah dengan infrastruktur pembangunan daerah sangat rendah yaitu sebesar 0,048%. Perbedaan penelitian Khalistyowati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Khalistyowati berstudy di Kabupaten Pemalang

sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tasikmalaya dan yang digunakan oleh penulis selama 6 tahun dari 2011 hingga 2016 dan penulis menggunakan data infrstruktur fisik dan non fisik sedangkan penelitian yang dilakuka Khalistyowati hanya menggunakan infrastruktur non fisik.

(Hari, 2004), tentang penelitiannya mengenai "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan PAD" menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD dan penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi dapat menjadi itikad pemerintah untuk memberikan layanan public yang lebih berkualitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hari dengan penelitian sekarang adalah tidak meneliti pertumbuhan ekonomi daerah.

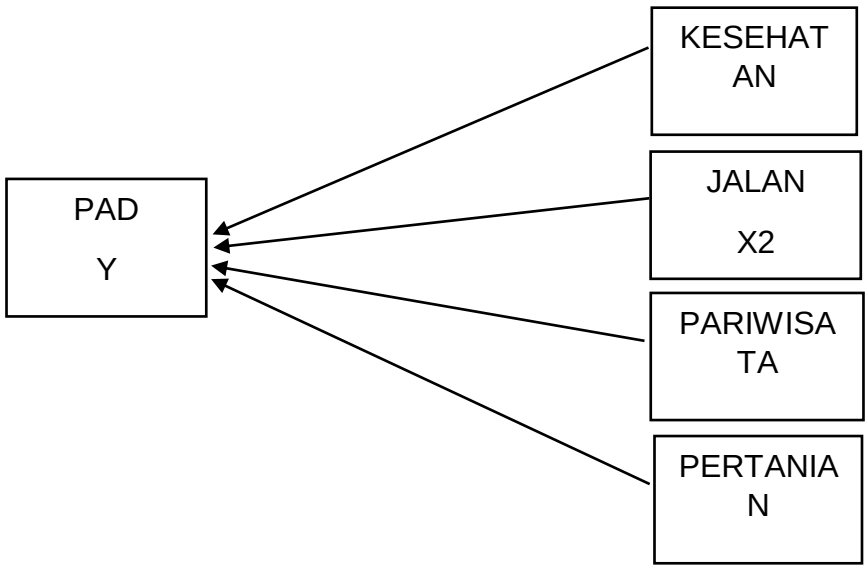
(Fauji, 2017), tentang penelitiannya mengenai "Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung" menjelaskan bahwa variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel belanja pemerintah bidang infrastruktur dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauji dengan penelitian sekarang adalah fauji menggunkaan variabel belanja bidang infrastruktur secara garis besar dan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan penulis menggunakan bidang infrastruktur pariwisata, pertanian, jalan, dan kesehatan dengan variabel dependen PAD.

(Jokosiswaya, 2007), tentang penelitiannya mengenai "Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Klaten" menjelaskan pada tahun 2001-2006 kontribusi sector pertanian terbesar terhadap PAD pada tahun 2002 sebesar 1,5720% dan yang terendah pada tahun 2006 sebesar 0,7961% . Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jokosiswaya dengan penelitian sekarang yaitu Jokosiswaya berfokuskan pada hasil dari sector pertanian terhadap penerimaan PAD sedangkan penulis menggunakan sektor

pariwisata, sektor kesehatan, sektor jalan, dan sector pertanian dalam penerimaan PAD.

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar Kerangka Pemikiran:



METODE PENELITIAN

Data operasional yang digunakan dalam peneltian ini merupakan data runtun waktu (*time series*), semua data diambil dalam bentuk Triwulan (per tiga bulan) dalam kurun waktu pada tahun 2011 sampai 2016 dan data diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKAD), dan sebagian data dari website yang sangat terpecaya dan akurat yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Model yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan oleh model ECM (*Error Corection Models*), ECM yaitu salah satu model yang tepat dalam time series yang tidak stasioner. Data yang tidak stasioner sering menimbulkan

ketidakseimbangan dalam analisis jangka pendek, akan tetapi bias menjadi adanya hubungan yang seimbang dalam analisis jangka panjang (Widarjono, 2013).

Stasioneritas Data

Menurut (Ariefianto, 2012) Pengujian stasioneritas data adalah hal terpenting dalam menganalisis data dengan urut waktu. Pengujian yang tidak memadai dapat mengakibatkan pemodelan menjadi tidak baik sehingga hasil yang diberikan dapat bersifat *spurious* (palsu). Terdapat berbagai metode dalam uji stasioneritas. Metode yang sering digunakan yaitu unit root test atau sering dikatakan uji akar unit. Dalam uji akar unit penulis menggunakan uji *Phillip dan Perron* (PP).

Kointegrasi Data

Uji kointegrasi diketahui untuk adanya hubungan jangka panjang antar variable-variabel yang akan diteliti. Data dapat dikatakan memiliki hubungan jangka panjang apabila data tersebut terkointegrasi pada tingkat level yang sama. Ada tidaknya kointegrasi didasarkan pada *likelihood ratio* (LR). Jika nilai kritis LR lebih kecil dibandingkan dengan nilai hitung LR maka terdapat kointegrasi. Johansen memberikan inovasi dengan menciptakan uji stasistik LR sebagai alternatif yang dikenal dengan *maximum eigenvalue statistic.*

***Error Correction Model* (ECM)**

Di dalam sebuah data time series sering sekali ditemukan data yang tidak stasioner, hal ini dapat menyebabkan hasil regresi yang menjadi meragukan atau regresi lancung. Regresi lancung merupakan situasi dimana hasil regresi dapat menunjukan nilai koefisien regresi yang signifikan secara model, signifikan secara model tidak ada saling keterkaitan antar variabel. ECM yaitu salah satu model yang tepat dalam time series yang tidak stasioner. Data yang tidak stasioner sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam analisis jangka pendek, akan tetapi bias menjadi adanya hubungan yang seimbang dalam analisis jangka panjang (Widarjono, 2013).

HASIL ANALISIS

Tabel I: Hasil Pengujian Jangka Panjang dan Jangka Pendek PAD

VARIABEL	KOEFISIEN (Standar Error) (T-Statistik) Probalitias		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Jangka Panjang	Jangka Pendek	Jangka Panjang	Jangka Pendek
C	0.0111	0.0087		
Kesehatan	-0.560498 0.708718 -0.789748 0.4394	-0.481861 0.689796 -0.698557 0.4949	Negative (Tidak Signifikan)	Negative (Tidak Signifikan)
Jalan	0.996546 0.563434 1.768701 0.0930	0.752439 0.575303 1.307900 0.2094	Positif (Signifikan)	Positif (Tidak Signifikan)
Pariwisata	-20.32661 8.849053 -2.297038 0.0332	-16.25683 8.844890 -1.837992 0.0847	Negative (Signifikan)	Negative (Signifikan)
Pertanian	3.701193 1.588198 2.330435 0.0310	3.384157 1.554908 2.176436 0.0448	Positif (Signifikan)	Positif (Signifikan)

Sumber: Data Hasil Olahan Eviws 9

Hasil Estimasi Jangka Panjang Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Uji signifikansi pada X_1 (Kesehatan) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.4394 > tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data tidak signifikan dan bernilai negative artinya gagal menolak H_0. Hal ini dkarenakan pada jangka panjang efek pada pembangunan infrastruktur

kesehatan belum dirasakan oleh masyarakat hal ini disebabkan dari pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang terbatas khususnya di daerah pedesaan serta masih minimnya alat penunjang kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang berdampak pada sebagian masyarakat kurang mendapat kesehatan dari pemerintah dan masyarakat tidak optimal dalam bekerja dalam mendapatkan pendapatan.

2) Uji signifikansi pada X_2 (Jalan) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.0930 < tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data signifikan dan bernilai positif artinya menolak H_0. Dapat diasumsikan apabila pembangunan infrastruktur jalan naik 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 0,996546 Rupiah. Hal ini dikarenakan pada jangka panjang penggunaan pembangunan jalan lebih dirasakan oleh masyarakat yang berdampak pada perputaran perekonomian menjadi lebih baik.
3) Uji signifikansi pada X_3 (Pariwisata) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.0332 < tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data signifikan dan bernilai negatif artinya menolak H_0. Dapat diasumsikan apabila pembangunan infrastruktur pariwisata turun 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 20,32661 Rupiah. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasana pendudukung pariwisata seperti akses jalan menuju tempat wisata, dan fasilitas untuk tempat wisata pada jangka panjang akan tetap menaikan penerimaan PAD, ini disebabkan oleh pada setiap tahunnya dari 2011-2016 pemerintah lebih meningkatkan program pengembangan pemasaran pariwisata seperti mempromosikan tempat wisata gunung galunggung dan di Kabupaten Tasikmalaya banyak menggelar acara seperti festival layang-layang agar menarik minat wisatawan yang menjadikan pemerintah tetap mendapat penerimaan PAD.
4) Uji signifikansi pada X_4 (Pertanian) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.0310 < tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data signifikan dan bernilai positif artinya menolak H_0. Dapat diasumsikan apabila pembangunan infrastruktur pertanian naik 1 Rupiah maka akan

menaikan penerimaan PAD sebesar 3,701193 Rupiah. Hal ini dikarenakan upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan membuka lahan baru untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang pertanian dengan membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian di beberapa kecamatan. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pertanian menjadikan pemenuhan kebutuhan beras dari tahun ke tahun menjadi surplus.

Hasil Estimasi Jangka Pendek Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Uji signifikansi pada X_1 (Kesehatan) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.4949 > tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data tidak signifikan dan bernilai negative artinya gagal menolak H_0. Hal ini dikarenakan pada jangka pendek kurangnya pengadaan alat kesehatan dan kurangnya pengadaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas serta sarana pengelolaan obat yang masih minim berdampak pada kesehatan yang diperoleh masyarakat menjadi tidak optimal.
2) Uji signifikansi pada X_2 (Jalan) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.2094 > tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data tidak signifikan dan bernilai positif artinya gagal menolak H_0. Hal ini dikarenakan pada jangka pendek penggunaan pembangunan jalan khususnya di daerah pedesaan belum dirasakan oleh masyarakat sebab masih minimnya jalan maupun kurangnya akses jalan dari desa ke kota maupun sebaliknya yang mengakibatkan terhambatnya perekonomian daerah.
3) Uji signifikansi pada X_3 (Pariwisata) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.0847 < tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data signifikan dan bernilai negatif artinya menolak H_0. Dapat diasumsikan apabila pembangunan infrastruktur pariwisata turun 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 16,25683 Rupiah. Hal ini dikarenakan banyak tempat wisata yang berpontensi dalam meningkatkan kunjungan

wisatawan tetapi kurangnya pengelolaan dari pemerintah seperti curug badak dan curug blak yang dikelola oleh masyarakat disekitar. Kurangnya gerakan yang bersinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadikan potensi wisata menjadi tertinggal atau kurang diperhatikan oleh pemerintah tetapi dapat menghasilkan retribusi dan pajak kepada pemerintah dari hasil wisata yang dikelola oleh masyarakat.

4) Uji signifikansi pada X_4 (Pertanian) didapatkan dengan membandingkan nilai probabilitas = 0.0448 < tingkat α 1%, 5%, dan 10% sehingga data signifikan dan bernilai positif artinya menolak H_0. Dapat diasumsikan apabila pembangunan infrastruktur pertanian naik 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 0,530787 Rupiah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja di Kabupaten Tasikmalaya. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh variabel di Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Pariwisata, dan Infrastruktur Pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2011-2016 dengan data Triwulan (per tiga bulan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Variabel Infrastruktur Kesehatan memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Namun berpengaruh negative tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek.
2) Variabel Infrastruktur Jalan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Namun

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek.

3) Variabel Infrastruktur Pariwisata memiliki pengaruh negative signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Namun berpengaruh negative signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek.
4) Variabel Infrastruktur Pertanian memiliki pengarih positif signfikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Namun berpengaruh posisitif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L. (2014). *analisis model kebijakan kerja sama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.* Jakarta: LIPI Press, anggota Ikapi.

Ariefianto, M. D. (2012). *EKONOMETRIKA esensi dan aplikasi dengan menggunakan eviews.* Jakarta: Erlangga.

Elita, D. (2002). Identifikasi Sumber-sumber PAD dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Digilib USU*.

Fauji, Z. (2017). *Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* . Provinsi Lampung: Skripsi.

Hari, A. P. (2004). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan PAD (Studi Kasus Kota/Kabupaten se Jawa-Bali). *ejournal*.

Herman, J. (2014). Implementasi Pembangunan Infratsruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah. *eJournal Administrative Reform*.

Jokosiswaya, Y. (2007). *Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Klaten.* Yogyakarta: Skripsi.

Khalistyowati, E. K. (2017, november minggu). *Analaisis Korelasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah.* Pemalang: Skripsi.

Putro, N. S. (2011). pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *eprints.undip.ac.id*.

Soamale, M. (2013). Pengaruh Pendapatan ASli Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula) . *ejournal*.

Susanto. (2005). kontribusi PAD terhadap besarnya belanja pembangunan daerah. *e-journal*.

Tasikmalaya, p. d. (2017, November Minggu). *profil kabupaten tasikmalaya*. Retrieved from www.tasikmalayakab.go.id: www.jabarprov.go.id

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yuniarto, S. R. (2009). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Skripsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Mengatur Perimbangan Keunangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.